LAPORAN PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU
Mal Pelayanan Publik Lantai III Jl. Merdeka Timur Desa Sui. Ringin Kec. Sekadau Hilir
Sekadau 79582 email : kpmptskd2014@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinbas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintupada tahun ini, diharapkan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat memperoleh solusi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

PAULUS YOHANES, SKM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19631227 1983071 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 1
2. Tujuan dan Manfaat 1
3. Ruang Lingkup 2
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3
3. Metode Pelaksanaan FKP 3
4. Susunan Acara FKP 4
HASIL PELAKSANAAN FKP
1. Identifikasi Masalah 5
2. Analisis 5
3. Rencana Aksi 6
PENUTUP
LAMPIRAN I Surat Undangan
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yangdiatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan FKP adalah :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayananpublik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakatatas layanan yang diberikan oleh

unit penyelenggara pelayanan.

Manfaat kegiatan FKP adalah :

a. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan pelayananpublik.
b. Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan pelayanan publik yangditetapkan.
c. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan terkaitberbagai kebijakan

3. Ruang Lingkup

FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam bentuk tatap muka dengan melibatkan pihak terkait diantaranya Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Peraturan Investasi, Pelaku Usaha dan Tokoh Masyarakat.

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau diselenggarakan di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau Lantai III pada hari Selasa, 10 Oktober pada pukul 09.00 WIB s.d. selesai

2. Penyelenggaran dan Peserta FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau dengan melibatkan pihak terkait yaitu :

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
b. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.
d. Analis Kebijakan Ahli Muda.
e. Analis Peraturan Investasi.
f. Pelaku Usaha.
g. Tokoh Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau diselenggarakan dengan metode tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau terdiri dari :

a. Pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau Standar Pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;
b. Masukan kritik/saran dari peserta terhadap Standar Pelayanan yang di Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;
c. Penandatangan Berita Acara Hasil FKP oleh peserta FKP.

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) Revisi/Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu :

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum maksimal.
b. Sanksi perizinan dan nonperizinan belum optimal.
c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS.
d. Aplikasi OSS masih menyulitkan pelaku usaha.

2. Analisis

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum maksimal, Sosialisasi perizinan dan non perizinan sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal melalui berbagai media *offline* dan *online*, hanya saja masih terdapat masyarakat yang tidak memanfaatkan media yang sudah disediakan untuk memeperoleh informasi mengenai perizinan dan nonperizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
b. Sanksi perizinan dan non perizinan belum optimal, Sanksi perizinan dan non perizinan sebenarnya perlu ditingkatkan antar SKPD teknis terkait dengan izin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sekadau. Sehingga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau dapat melakukan pemberian sanksi pencabutan izin terhadap usaha yang melanggar/menyalahi peraturan perundangan-undangan/ketentuan yang sudah ditetapkan.

c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS sangat terbatas dikarenakan SDM yang ada jumlahnya terbatas. Terlebih dengan adanya struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang "menghilangkan" eselon IV di bawah bidang sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan.

d. Aplikasi OSS masih menyulitkan pelaku usaha. Permasalahan di daerah terkait OSS RBA adalah menu aplikasi OSS sering mengalami perubahan sehingga sangat membingungkan pengguna (SKPDsebagai user) dan pelaku usaha.

3. Rencana Aksi

A. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan secara intensif melalui berbagai media baik *offline* maupun *online*. Adapun media *offline* dan *online* yang sudah digunakan dalam penyebaran informasi perizinan dan nonperizinan seperti :

a. Brosur/leaflet/pamplet yang diserahkan kepada

SKPD layanan, Kantor Kecamatan, Ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Papan Pengumuman.

b. W*ebsite*, *Facebook* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

c. Baliho/reklame yang ditempatkan di Halaman Kantor Kecamatan.

d. *Banner*.

e. Spanduk.

f. Media Massa (Radio/Surat Kabar).

g. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan (secara tatap muka).

B. Meningkatkan koordinasi secara intensif antar SKPD teknis terkait penerbitan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan melalui pertemuan/rapat koordinasi

C. Mengajukan permintaan tenaga/SDM kepada BKPSDM Kabupaten Sekadau terkait penambahan SDM untuk melakukan pengawasan.

D. Memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi OSS kepada Kementerian Investasi RI/BKPM RI melalui forum pertemuan/rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi RI/BKPM RI agar lebih meningkatkan sosialisasi di tingkat daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau,maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya yaitu:

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum maksimal.

b. Sanksi perizinan dan nonperizinan belum optimal.

c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS.

d. Aplikasi OSS masih menyulitkan pelaku usaha.

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan saran/masukan dari perwakilan peserta FKP yang dituangkan ke dalam Berita Acara (terlampir). Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau selaku penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk segera menindaklanjuti saran/masukan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau Lantai III
Jl. Merdeka Timur Kec. Sekadau Hilir Telp./Fax. (0564) 2042075
SEKADAU 79582

Sekadau, 9 Oktober 2023

Kepada,
Yth. DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR
Di-
SEKADAU

Nomor : 065/ 116 / DPMPTSPTK-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Forum Konsultasi Publik, serta menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomo 065/1791/OR tanggal 27 September 2023 perihal Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Oktober 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

PAULUS YOHANES, SKM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19631227 1983071 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR UNDANGAN

NO	JABATAN / INSTANSI
1	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
2	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.
4	Analis Kebijakan Ahli Muda.
5	Analis Peraturan Investasi.
6	Pelaku Usaha.
7	Tokoh Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau Lantai III
SEKADAU 79582

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

Pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Sosialisasi perizinan dan non perizinan masih belum maksimal	Perlu ditingkatkan sosialisasi perizinan dan non perizinan secara intensif melalui berbagai media baik offline maupun online	1 (satu) Minggu
2.	Sanksi perizinan dan non perizinan bulum optimal	Perlu ditingkatkan koordinasi secara intensif antar SKPD teknis terkait penertiban pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan	1 (satu) Minggu
3.	Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS	Mengajukan permintaan tenaga /SDM kepada BKPSDM Kabupaten Sekadau terkait penambahan SDM untuk melakukan pengawasan	1 (satu) Minggu
4.	Aplikasi OSS masih menyulitkan pelaku usaha	Memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi OSS kepada Kementrian Investasi RI/BKPM RI melalui forum pertemuan / rapat koordinasi yang	1 (satu) Minggu

Dipindai dengan CamScanner

		diselenggarakan oleh Kementrian Investasi RI/BKPM RI	

Pihak DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau dapat menerima Identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Pihak DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau sesuai usulan rekomendasi jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikan berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Santi, S.Kom	DPMPTSPTK	1
2	Henyanto,SE	DPMPTSPTK	2
3	Abang Feliks, SE	DPMPTSPTK	3
4	Tati Sutriasih,S.IP	DPMPTSPTK	4
5	Sukamto	Pelaku Usaha	5
6	Rahmat	Pelaku Usaha	6

A.n Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau
Sekretaris

NOPITA,SP,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19791123 200604 006

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANM TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau yang telah ditandatangani pada hari selasa Tanggal Sepuluh Bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (Selasa, 10 Oktober 2023). Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan, antara lain :

No.	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Perlu ditingkatkan sosialisasi perizinan dan nonperizinan secara intensif melalui berbagai media baik *offline* maupun *online*.	Bentuk Tindak Lanjut	Sosialisasi perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui Brosur/leaflet/pamplet, W*ebsite, Facebook* DPMPTSPTK, Papan Pengumuman, Pelayanan Keliling, Baliho/reklame, *Banner*, Spanduk, Media Massa (Radio/Surat Kabar), Sosialisasi tatap muka.
		Waktu Pelaksanaan	Setiap bulan
		Rencana Aksi/Keterangan	Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan secara intensif melalui berbagai media baik *offline* maupun *online*.
2	Sanksi perizinan dan nonperizinan belumoptimal.	Bentuk Tindak Lanjut	Meningkatkan koordinasi secara intensifantar SKPD teknis terkait penerbitan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan
		Waktu Pelaksanaan	Minggu pertama bulan Juni 2022
		Rencana Aksi/Keterangan	koordinasi secara intensif antar SKPD teknis terkait melalui pertemuan/rapat koordinasi
3	Sulitnya pengawasan dan pembinaan	Bentuk Tindak Lanjut	Mengajukan permintaan tenaga/SDMkepada

Dipindai dengan CamScanner

	ter kait perizinan melalui OSS.		BKPSDM Kabupaten Sekadau terkait penambahan SDM untukmelakukan pengawasan.
		Waktu Pelaksanaan	Minggu Pertama Bulan November 2023
		Rencana Aksi/Keterangan	Telah dikirim surat permintaan tenaga/SDM ke BKPSDM
4	Aplikasi OSS dan SIMBG masih menyulitkan pelakuusaha.	Bentuk Tindak Lanjut	Memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi OSS kepada Kementerian Investasi RI/BKPM RI melalui forum pertemuan/rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi RI/BKPM RI agar lebih meningkatkan sosialisasi di tingkat daerah.
		Waktu Pelaksanaan	Minggu Pertama bulan November 2023
		Rencana Aksi/Keterangan	Mengikuti kegiatan/forum pertemuan/rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi RI/BKPM RI

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

A.n Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau
Sekretaris

NOPITA,SP,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19791123 200604 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Mardeka Timur Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau
SEKADAU 78582 KALIMANTAN BARAT

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 10/10/2023
Pukul :
Tempat : Mal Pelayanan Publik
Agenda : FKP

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Santi	DPMPTSPTK	Kabid PKPL	1.
2.	Henpanto	DPMPTSPTK		2.
3.	Ag. Felix	DPMPTSPTK		3.
4.	Sukamto	Pemilik usaha	—	4.
5.	Tatik	DPMPTSPTK	Analis Kebijakan	5.
6.	Rahmat	Pemilik usaha		6.
7.	Cuberanus A.		PST	7.
8.				8.
9.	Martinus L.	DPMPTSPTK	Pengelola data	9.
10.				10.

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DINAS PMPTSPTK

MAL PELAYAN PUBLIK KABUPATEN SEKADAU

Dipindai dengan CamScanner